

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PROXY WAR SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB GERAKAN SEPARATISME DI INDONESIA

Nurwulansari¹, Panji Suwarno², Syamsunasir³, Pujo Widodo⁴

Universitas Pertahanan Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nurwulansari30@gmail.com¹ suwarnopanji@gmail.com² syamsunasir@gmail.com³ pujowidodo78@gmail.com⁴

Abstrak

Gerakan separatisme banyak menimbulkan kekhawatiran di berbagai belahan dunia. Salah satu penyebabnya adalah Proxy War. Proxy War menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai karena ancamannya yang tidak terasa tapi sangat merusak keutuhan bangsa Indonesia. Proxy War dianggap lebih murah dan tidak terlalu memakan banyak korban bagi negara penyelenggara. Oleh karena itu, Proxy War dianggap lebih efektif dibandingkan strategi pada zaman dahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti mengambil data dari studi pustaka dan mengamati perkembangan saat ini melalui media. Banyak strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah Proxy War diantaranya adalah dengan membangun kekuatan berdasarkan sumber daya alam dan budaya dan dengan upaya pembangunan karakter warga negara Indonesia.

Kata Kunci : Proxy war, Gerakan Separatisme, Pembangunan Karakter Bangsa, Pengembangan Kekuatan dari Sumber Daya Alam dan Budaya

Abstract

The separatist movement raises a lot of concerns in various parts of the world. One of the causes is Proxy War. Proxy War is one of the things that must be watched out for because the threat is not felt but is very damaging to the integrity of the Indonesian nation. Proxy War is considered cheaper and less costly for the host country. Therefore, Proxy War is considered more effective than the strategy in the past. The research method used is descriptive qualitative. Researchers took the data from literature studies and observe current developments through the media. There are many strategies that can be taken by the government in an effort to prevent Proxy War by developing the strength based on natural resources and cultural of Indonesia and character buiding.

Keywords: Proxy war, Separatism Movement, Character Building, Developing Natural Resources and Cultural



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser, dimana saat ini kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara semakin kecil. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia salah satunya adalah Perang Proxy (Proxy War). Proxy War tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui politik, ekonomi, social dan budaya termasuk bidang lainnya. Hal inilah yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia ke depan. Peperangan masa depan adalah salah satu corak perang dalam spektrum konflik yang telah kita kenal.

Perang ini merupakan satu cara perang yang relatif baru yang akan selalu dikembangkan. Peperangan masa depan ini bersifat total dimana segala cara dan sarana dibenarkan untuk mencapai tujuan. Ini sesuai dengan teori yang dikatakan Mao Tse Dong untuk mencapai tujuan perang segala cara dan sarana dapat saja dilakukan tanpa mengindahkan moral dan berkembangnya kebencian. Yang jelas peperangan masa depan ini tidak mempunyai pola yang sama, tidak mempunyai front dan tidak kaku seperti perang

konvensional. Perang konvensional mengandalkan kecanggihan mesin dan teknologi perang yang cenderung membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka kemudian lahir konsep perang baru yang mengandalkan taktik dan strategi perang yang dikenal dengan perang Proxy. Perang Proxy atau Proxy War adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal.

Peperangan masa depan secara umum menggunakan strategi perang non konvensional dan menjadikannya sebagai upaya yang efektif dalam mencapai tujuannya. Melihat kenyataan ini maka sudah semestinya pemahaman terhadap seluk beluk peperangan masa depan perlu diketahui secara mendalam. Apabila hal ini tidak kita lakukan atau dengan kata lain kita selalu hanya berpikir tentang perang konvensional saja, maka kita akan dapat dikalahkan oleh lawan yang menggunakan strategi peperangan masa depan (Proxy War). Proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis. Gerakan Separatis. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum merupakan contoh Proxy War yang nyata. Gerakan KKB di Papua sekarang juga menjadi indikasi dari adanya Proxy War di Indonesia. Untuk itulah, peneliti ingin meneliti bagaimana Strategi Pemerintah dalam menghadapi Proxy War di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam memahami permasalahan yang diajukan adalah deskriptif analisis dengan studi kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur dan observasi. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber referensi yang relevan seperti buku, artikel, dan perundang-undangan terkait, baik dari sumber tertulis maupun sumber digital. Kemudian observasi dilakukan dengan mengamati sikap dan perilaku warga negara serta masyarakat, termasuk dari sumber pemberitaan maupun spectrum interaksi sehari-hari. Hasil data studi literatur dan observasi kemudian diperiksa kebermaknaannya yang relevan dengan dengan keadaan sebenarnya. Merujuk pada objek bahasan, data-data yang dikumpulkan terkait dengan proxy war dan indikasinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah proxy war yang ada di Indonesia. Agar Indonesia kedepannya tidak terjebak lagi dengan permasalahan yang sama yang akan memecah belah bangsa Indonesia seperti yang telah Indonesia hadapi sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Memahami Proxy War

Dalam perspektif Indonesia, seperti yang dituliskan Hidayat, bahwa isu mengenai proxy war ini semakin besar setelah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan sosialisasi ke berbagai pendidikan tinggi, organisasi masyarakat dan pemuda serta berbagai kalangan di Indonesia mengenai ancaman proxy war. Proxy war dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian perang perpanjangan tangan (Hidayat, 2017). Perang yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri atau aktor lain yang beroperasi tentu saja dengan memanfaatkan masyarakat lokal atau setempat.

Kamus Oxford Online memiliki pengertian tentang proxy war yang kurang lebih sama, yaitu : a war instigated by a major power which does not itself become include. Dalam istilah yang dikemukakan oleh Loveman, 2022, pemegang mandat proxy war hanyalah kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya, lewat cara

menghindari keterlibatan langsung. Tidak jauh berbeda dengan makna proxy war yang disampaikan Mumford, 2013 yaitu: *...conflicts in which a third party intervenes indirectly in order to influence the strategic outcome in favour of its preferred faction*. Dalam teori ini, pihak yang berkonflik langsung disebut perpanjangan tangan dan pihak yang memanfaatkan mereka sekaligus aktor utama disebut pihak ketiga.

Dalam hal ini, Azyumardi Azra, yang dikutip Sudiaman, 2016 menjelaskan bahwa proxy war atau secara lebih spesifik 'proxy sectarian war' perang Proxy karena sektarianisme keagamaan. Secara singkat, 'proxy war' adalah perang boneka di antara dua negara atau lebih tanpa melibatkan secara langsung negara-negara atau warga negara itu sendiri dalam perang terbuka di antara mereka. Perang justru terjadi dan berkobar di negara atau wilayah lain di antara kelompok pro dan anti masing-masing negara yang menjadi semacam 'boneka' karena mendapat bantuan dana, pelatihan dan persenjataan dari negara-negara yang bertarung. Oleh karena itu, lazimnya proxy war terjadi dan sering berlangsung lama bukan di negara yang berkontestasi. Biasanya proxy war terjadi di wilayah lain di luar kedua negara yang saling bermusuhan dan ingin menghancurkan lawannya.

Di dalam proxy war terdapat soft power dan hard power. Soft power adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan (Wilson, 2008). Metode ini akan sulit disadari sebagai sebuah strategi untuk memporakporandakan sebuah negara. Nye menyatakan bujukan sebagai kekuatan persuasif berdasarkan daya tarik dan emulasi dari sumber daya budaya, ideologi, dan lembaga. Dispersi budaya Amerika dalam Blok Timur selama Perang Dingin menunjukkan adanya soft power Amerika, dan proses perluasan Uni Eropa merupakan contoh soft power (Nye, 2009). Berbeda dengan hard power yang didasarkan pada koersif melalui intervensi militer, diplomasi dan sanksi ekonomi dan bergantung pada sumber daya yang nyata seperti angkatan bersenjata atau kekuatan ekonomi. Contoh penggunaan hard power adalah invasi Jerman ke Polandia (1939), dan sanksi ekonomi PBB terhadap Irak (1991) pasca Perang Teluk I (Gallarotti, 2011).

Efektivitas pendekatan hard power dan soft power tergantung pada aksesibilitas sumber daya. Negara-negara besar (major powers) seperti Amerika Serikat atau Rusia dengan pendapatan nasional yang lebih tinggi mampu secara finansial untuk mempertahankan angkatan bersenjata yang besar, dan menempatkan negara-negara lain secara ekonomi berada di bawah tekanan. Negara-negara yang lebih kecil, dengan minimnya kemampuan hard power, namun memiliki kekuatan soft power dapat menjadi kekuatan untuk mempengaruhi negara lain seperti halnya Norwegia (Hidayat, Nye, 2004).

Proxy war cenderung dimulai dengan soft power mulai dari diplomasi, pemberian donasi, sampai dengan membina kelompok insurjensi (dissident) dalam suatu negara. Adagium *enemy's enemy is friend* kerap diimplementasikan dalam melakukan soft power. Pada skala tertentu ketika soft power tidak efektif lagi maka dilakukan hard power dalam bentuk embargo, intervensi politik, dan intervensi militer melalui upaya-upaya penentangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal melalui organisasinya sejalan dengan keinginan yang telah ditularkan oleh negara-negara besar sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Hidayat, 2017).

Proxy war bagi masyarakat awam mungkin lebih sederhana memahami isu ini lewat pengalaman penjajahan di masa lalu. Dimana ketika itu sejarah mencatat adanya politik pecah belah (*divide et impera*) oleh penjajah Belanda untuk menguasai bumi Indonesia. Lewat cara-cara adu domba di antara komponen bangsa itulah salah satu upaya guna melemahkan kekuatan suatu negara sebelum perang konvensional (perang fisik) dilakukan (Bambang, 2017). Jika di dalam perang konvensional, perang asimetris dan hibrida beban biaya perang demikian besar, namun tidak demikian halnya dengan perang proksi, perang ini

menggunakan cara cara licik, penuh muslihat (tricky), yakni memakai pihak ketiga untuk menaklukkan lawan, proxy artinya wakil, jadi perang proxy adalah memberikan mandat; perang kepada pihak ketiga, biasanya menggunakan negara lain yang lebih kecil atau bisa pula menggunakan aktor non negara seperti ormas, LSM, kelompok masyarakat atau bisa juga melalui perseorangan.

Strategi pelemahan demikian adalah sebuah cara yang dianggap efisien (low cost) dalam teori perang. Mumford mengutip pernyataan Eisenhower yang menyebut proxy war sebagai the cheapest insurance in the world sementara Zia ul-Haq—mantan Presiden Pakistan menyebutnya sebagai sebuah upaya untuk menjaga teko tetap hangat'. Seperti yang disampaikan Mumford dalam tulisannya, yaitu: Many of the proxy wars of the Cold War (such as the US's indirect intervention in Afghanistan during the 1980s) and after (like the recent Iranian proxy involvement against the US military in Iraq) could not have happened without existing local tensions ready to be exploited (Mumford, 2013).

Pernyataan Mumford tersebut bisa kita kaitkan dengan proxy war yang saat ini masih berlangsung, yaitu perang saudara di Suriah yang sejak 2011 sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan berhenti padahal telah merenggut lebih dari 400.000 jiwa. Perang saudara tersebut yang awalnya hanya konflik dalam negeri Suriah, namun saat ini telah melibatkan banyak negara besar di dunia yang kemudian ikut membiayai dan mempersenjatai pihak-pihak yang berkonflik dengan berbagai kepentingan. Dari contoh tersebut membuktikan bagaimana efektifnya penggunaan cara-cara proxy war untuk menghancurkan sebuah negara tanpa harus menyerang, menginvasi, atau menguasai negara tersebut secara langsung, melainkan dengan memanfaatkan potensi konflik di dalamnya.

Tahapan Proxy War

Proxy war adalah sebuah perang yang terjadi antara dua negara atau dua kubu dimana negara-negara tersebut tidak terlibat secara langsung, melainkan melibatkan pihak ketiga (peran pengganti). Perang justru terjadi di luar wilayah kedua negara yang saling bermusuhan. Meskipun perang ini tidak berdampak langsung terhadap kedua negara, sistem perang ini juga digunakan untuk melawan 'sekutu' musuh mereka, atau membantu sekutu mereka melawan musuh-musuhnya (Jawahir, 2019). Sistem perang ini diharapkan bahwa pihak ketiga tersebut tidak menimbulkan perang skala penuh selama konflik berlangsung. Pentahapan Proxy War sebagai berikut : tahap I Infiltrasi, tahap II Eksploitasi, tahap III Politik Adu Domba dan tahap IV Cuci Otak serta tahap V Invasi/Pencapaian Sasaran. Adapun pentahapan sebagai berikut:

a. Tahap I, Infiltrasi.

Tahap Infiltrasi. Dalam tahap ini dilakukan sebuah infiltrasi melalui bidang-bidang seperti intelijen, militer, pendidikan, ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya atau kultur dan agama, bantuan-bantuan, kerjasama diberbagai bidang, termasuk penggunaan media dan informasi. Tahap ini merupakan penjajahan paradigmatis, dimulai dengan infiltrasi tekanan dan paksaan terhadap negara sasaran untuk menerapkan isu global sebagai system nilai, norma dan kepentingan universal yang belum tentu cocok dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai negara sasaran demi kepentingan aktor tersebut.

b. Tahap II, Eksploitasi.

Dalam tahap ini dilakukan eksploitasi dengan melemahkan dan menguasai bidang-bidang seperti intelijen, angkatan bersenjata, ekonomi, politik, budaya dan ideologi, termasuk pendidikan, dimana semua ini sebenarnya adalah titik berat dari kekuatan suatu negara. Kegiatan intelijen dilakukan dengan menerapkan aksi penggalangan terhadap kelompok

tertentu untuk mempersiapkan aksi-aksi yang dapat menimbulkan konflik nasional yang dapat menghambat gerak maju pembangunan nasional. Tahap ini dilakukan pembentukan sel-sel perlawanan di negara sasaran. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap kedua yang ditujukan untuk mematangkan situasi dan kondisi yang diciptakan agar dapat masuk ke tahap berikutnya.

c. Tahap III, Politik Adu Domba.

Dalam tahap ini dilakukan politik adu domba. Pada tahap adu domba ini Kekuatan Asing (Konspirasi Global), melakukan upaya kegiatan melalui kaki tangannya (orang atau tokoh) baik yang menyadari maupun yang tidak menyadari bahwa dia diperalat oleh kekuatan asing tersebut, media, dan dibantu sarana maupun prasarana lainnya. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kekacauan ataupun kekerasan, konflik horizontal (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan menimbulkan perang saudara. Berikutnya bertujuan agar muncul keinginan memisahkan diri dari NKRI atau tindakan separatisme. Biasanya dimulai dengan eskalasi pemberontakan, dan pada akhirnya terjadi pertikaian antar anak bangsa dan perang saudara.

d. Tahap IV, Cuci Otak (Brain Wash).

Dalam tahap ini mereka mempengaruhi paradigma berfikir masyarakat, yakni paradigma kebangsaan (nasionalisme) menjadi cara pandang yang universal dengan keutamaan isu-isu global, semisal demokratisasi, lingkungan hidup, dan Hak Asasi Manusia, ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemajuan teknologi dan globalisasi dimanfaatkan untuk mempermudah terbentuknya masyarakat yang lupa akan jati diri bangsanya (lost generation).

e. Tahap V, Invansi / Pencapaian Sasaran.

Tahap ini adalah tahap akhir dimana tahap ini dilakukan dalam keadaan terpaksa, jika tahap tahap sebelumnya dinilai belum membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam tahap ini, ketika Wawasan Kebangsaan suatu negara yang menjadi sasaran telah hancur dan jati diri bangsa menjadi hilang, maka praktis negara yang menjadi sasaran telah dapat dikuasai, atau negara sasaran dalam kondisi penguasaan dan terjajah dalam segala aspek kehidupan. Berikutnya, tinggal membuat negara boneka yang diwakili oleh para komprador.

Jika melihat dari kelima fase Perang Proxy tersebut, sadar ataupun tidak sadar, saat ini telah terjadi Perang Proxy di Indonesia, dengan menjalankan strategi sesuai dengan Perang Modern yang dijelaskan sebelumnya. Kapitalisme internasional yang dipimpin oleh negara maju beserta koalisi berusaha untuk mendegradasi Wawasan Kebangsaan, memecah persatuan bangsa agar lemah, dan akhirnya akan mempengaruhi berbagai keputusan penyelenggara negara, termasuk pada tujuan akhirnya yaitu menguasai mayoritas sumber daya alam.

Perkembangan Proxy War dan Situasi Indonesia

Sampai sejauh ini, perang proksi lebih banyak dipahami sebagai sebuah hubungan antara aktor dan proksinya yang ditandai dengan dukungan masif untuk berperang. Bagaimana aktor dapat membentuk proksi adalah persoalan yang kurang diperhatikan. Pada dasarnya, terdapat narasi yang sengaja dibangun oleh aktor untuk menciptakan proksi. Melalui narasi tersebut, proksi digiring untuk melakukan aksi demi kepentingan aktor.

Intervensi pertama yang dilakukan oleh aktor perang proksi adalah memproduksi narasi kemudian mendistribusikannya kepada calon proksinya. Selain itu, aktor tidak hanya melakukan intervensi ketika konflik telah berlangsung, melainkan juga dapat melakukan intervensi dalam kerangka untuk menciptakan konflik melalui proksinya (Kementerian Pertahanan RI. 2020).

Kini terminologi perang proksi menjadi meluas, terutama dengan melibatkan perang informasi yang bertujuan menciptakan konflik-konflik internal. Perang proksi yang lebih membahayakan adalah jika pelakunya bukan negara (non state actor) dan sering sulit diidentifikasi dengan caranya yang senyap. Di dalam dunia intelijen ada dikenal cara-cara infiltrasi semacam gerakan bawah tanah (operasi clandestine), dimana cara-cara demikian bisa sangat mungkin digunakan oleh musuh-musuh negara untuk menyemai bibit-bibit perang proksi di masyarakat (Mumford, 2013).

Sekarang ini, teknologi modern (komunikasi dan informasi), seperti media elektronik, sosial media menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan proxy war. Distribusi narasi pembentuk proksi melalui jaringan internet dapat juga dikategorikan ke dalam peperangan proksi dengan cyber mode (Media sosial telah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) sebagian masyarakat Indonesia untuk membangun jejaring yang spesifik berdasarkan visi, hobi, gagasan, asal daerah, profesi dan lain-lain secara luas dan cepat tanpa sekat pembatas wilayah dan waktu.

Menurut Amin Abdullah, 2017, sebenarnya sudah mulai 2 atau 3 tahun sebelumnya, dunia media sosial Indonesia dipadati dan dijejali berita bohong (hoax), serangan fajar proxy war, yang sengaja dibuat, direkayasa, dimanipulasi untuk mengadu domba sesama anak bangsa, antar sesama pemimpin politik, pemimpin negeri, pemimpin agama, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan keislaman dan begitu seterusnya. Solidaritas social keagamaan dan kebangsaan diacak-acak dan dicabik-cabik oleh para pencari keuntungan dengan jualan berita bohong (fake news) untuk kepentingan politik sesaat.

Fenomena terorisme ISIS yang menggunakan Media Sosial sebagai alat untuk propaganda aksi terorisme dan merekrut pengikut lintas Negara merupakan contoh yang nyata bagaimana Media Sosial saat ini telah menjadi alat untuk melancarkan proxy war secara efektif, dan mempunyai kemampuan mempengaruhi moral, semangat juang, budaya, nasionalisme dari sebuah Bangsa khususnya generasi mudanya (Bambang, 2022)

Inilah mengapa Marsekal Hadi menyampaikan bahwa keamanan dimensi cyber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan nasional (Bayu, 2019). Lepasnya Timor Timur dari Indonesia di mulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum, merupakan contoh Perang Proksi yang nyata (Nafis, 2021). Timor Timur adalah sebuah pulau yang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menyimpan sumber daya alam yang melimpah ruah, seperti minyak dan gas bumi. Disinyalir, lepasnya Timor Timur tak lain akibat adanya peran Australia yang ingin menguasai cadangan minyak di Celah Timor. Campur tangan asing yang begitu banyak, termasuk tekanan dari kelompok yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga PBB, pada akhirnya membuat Indonesia bersedia melepaskan wilayah itu.

Gerakan Separatisme di Papua

Eskalasi konflik yang meningkat harus mendapat perhatian dari pemerintah dan setiap stakeholder terkait, terutama para akademisi. Gerakan Separatisme adalah Gerakan yang membuat kehancuran bagi bangsa Indonesia dengan cara memecah belah bangsa. Contohnya adalah Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan

bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum merupakan contoh Proxy War yang nyata. Dari contoh diatas, penulis juga mengkhawatirkan hal yang sama terjadi pada Papua yang terindikasi bahwa wilayah tersebut juga berada dibawah pengaruh pihak Asing untuk keluar dari negara Indonesia dengan berbagai konflik yang ada di dalamnya seperti konflik SARA, ekonomi, politik dll yang hingga kini terus menimbulkan korban dan belum ada penyelesaiannya.

Gerakan separatisme di Papua terbilang cukup banyak, dan tidak semua disebut dengan istilah umum Organisasi Papua Merdeka (OPM), seperti yang banyak dikenal. Mereka ada dibawah beberapa bendera, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), dll. Namun secara umum saat ini gerakan-gerakan tersebut dikelompokkan menjadi Kelompok Separatis Papua (KSP). Jika mereka melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata yang mematikan (*lethal*), mereka akan dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Organisasi-organisasi seperti inilah yang sering kali menjadi penyebab konflik muncul di Papua. Dengan ide separatisme saja, mereka sudah bisa merangsang terjadinya tindak kekerasan, bagaimana jika mereka menggunakan senjata. Parahnya lagi, isu yang dimainkan di media massa adalah kekerasan ini adalah akibat dari aparat keamanan atau negara. Padahal, tugas negara mengamankan rakyat Papua dari tindakan dan aksi mereka.

Beberapa konflik disebabkan oleh KSP tersebut. Sekalipun memang cukup banyak konflik, termasuk konflik bersenjata, yang terjadi di Papua, berikut adalah beberapa peristiwa yang bisa dirangkum untuk menceritakan sejarah konflik di Bumi Cenderawasih tersebut. Perlawanan bersenjata OPM pecah untuk pertama kalinya pada 26 Juli 1965 di Manokwari. Kemudian, menurut laporan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) berjudul "*The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement*", kegiatan penambangan Freeport pada 1973 memicu aktivitas militer OPM di wilayah Timika.

Pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang Freeport dan direspons dengan operasi militer, terutama di Desa Amungme. Tanah Freeport sendiri dulunya merupakan tanah adat suku Amungme dan Komoro yang merupakan penduduk asli di wilayah tersebut. Direktur Eksekutif *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) Markus Haluk dalam buku "*Menggugat Freeport*" menyebutkan 60 orang suku Amungme menjadi korban kekerasan militer dalam insiden itu.

Kasus-kasus lain juga kerap bermunculan. Contohnya, adalah kasus Wasior pada 2001 dan kasus Wamena pada 2003 yang lagi-lagi disebabkan konflik aparat dengan warga setempat. Gerakan separatis, yang sekarang juga identik dengan istilah kelompok kriminal bersenjata, menuduh pemerintah (aparat keamanan) telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, tindakan mereka adalah makar yang melawan hukum nasional, alias melawan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, gelombang kekerasan yang terjadi sekitar akhir tahun 2019 mengakibatkan delapan orang sipil tewas di Deiyai dalam kerusuhan pada 28 Agustus 2019. Kemudian, kerusuhan lain terjadi pada 26 September 2019 mengakibatkan 33 orang tewas di Wamena dan empat orang tewas di Jayapura. Tragedi mengenaskan lainnya terjadi pada 2 Desember 2018 yang menewaskan 31 pekerja proyek jalan raya Trans Papua tewas ditembak di wilayah Nduga oleh kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Peristiwa itu dijawab dengan operasi militer di wilayah Nduga. Amnesty International Indonesia mencatat 182 warga sipil Nduga meninggal dalam pelarian diri, setelah kampung mereka didatangi aparat keamanan yang memburu kelompok Egianus. Gerakan separatis menuduh aparat keamanan yang membuat warga sipil sampai kehilangan nyawa, padahal tugas mereka adalah menangkap para pengacau keamanan tersebut. Justru tokoh pro-

kemerdekaan Papua, Benny Wenda, yang sering menjadi dalang kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

Gerakan yang dilakukan KSP seringkali merupakan gerakan bersenjata yang sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan kemerdekaan Papua ini juga telah berkembang dan merambah kampanye internasional sebagai media melancarkan aksinya. Hal ini karena gerakan bersenjata dianggap tidak efektif lagi dalam mewujudkan visi yang diinginkan. Alhasil, mereka adalah dalang dari semua konflik-konflik yang ada di Papua.

Oleh karena itu, mereka melakukan kampanye internasional yang aktif dan mengangkat isu-isu sensitif tentang Papua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga ke berbagai negara. Sekalipun upaya marak dilakukan, namun tidak ada satu pun negara di dunia yang mengakui bahwa Papua adalah negara. Memang banyak negara mendukung kemerdekaan Papua, namun semuanya masih mengakui Papua sampai saat ini adalah bagian dari negara Indonesia.

Fakta ini adalah bukti bahwa gerakan separatisme telah kehilangan arah. Ketika dulu mereka gagal dalam berjuang di Papua melalui upaya kekerasan, teror, dan sebagainya, kali ini mereka juga gagal mempengaruhi dunia internasional untuk mengakui mereka sebagai negara. Mendukung kemerdekaan adalah hal yang sangat berbeda dengan mengakui kedaulatan Papua sebagai sebuah negara. Berjuang di *front* internasional memang bisa memenangkan opini publik internasional. Namun, dalam konteks kedaulatan sebuah negara, opini publik tidak bisa dijadikan ukuran. Paramater utamanya adalah hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional, termasuk PBB (Ibid, 2020).

Pembahasan

Strategi Menghadapi Proxy War Dengan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Budaya

1. Modal Geografi

Posisi Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa menempatkan Indonesia dalam wilayah tropis yang hanya mengalami dua jenis musim yaitu kemarau dan penghujan. Dengan dua musim tersebut, sebagaimana juga dimiliki negara-negara lain disekitar garis ekuator, Indonesia memiliki potensi vegetasi dan bercocok tanam sepanjang tahun. Sementara itu dari sudut pandang ketersediaan air bersih, data menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki lebih dari 5.000 m³ air bersih per kapita per tahun. Lebih banyak dibandingkan negara-negara lain seperti India, Banglades dan Korea Selatan serta negara-negara Benua Afrika yang saat ini telah mengalami krisis air bersih. Selain itu, kita juga diberikan bonus anugerah kekayaan alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan dan di bawah perut bumi Indonesia yang sangat beragam dan melimpah. Indonesia mempunyai sejarah sebagai bangsa yang disegani dan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain didunia. Nilai-nilai luhur rakyatnya dan kearifan lokal masyarakatnya mampu menyatukan keanekaragaman budaya, tradisi dan adat-istiadat dalam ikatan kebersamaan yang saling menghormati dan menghargai. Tak heran jika ada dua kerajaan besar yang pernah memiliki wilayah hampir seluruh Asia Tenggara, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dengan pengembangan Sumber daya Alam yang ada di Indonesia ini, banyak hal yang dapat dilakukan seperti ekspor dan impor untuk meningkatkan ekonomi dan membuat persenjataan untuk memperkuat negara Indonesia.

2. Kearifan Lokal dan Pancasila

Nilai-nilai asli Indonesia terbukti mampu mengakomodir semua kepentingan kelompok menjadi perpaduan yang serasi dan harmonis. Nilai-nilai tersebut merupakan kearifan lokal

yang dapat membawa Indonesia ke puncak kejayaan, diantaranya semangat gotong royong, tolong menolong, kemajemukan dan budi pekerti. Semangat gotong royong merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia yang ada sejak nenek moyang kita. Sebagai contoh, apabila di suatu masyarakat di daerah pegunungan merasa adanya kerawanan tanah longsor atau banjir, maka seluruh warga akan bekerja bersama-sama mengerjakan pekerjaan *treasuring* untuk menghindari bencana tersebut tanpa mengharapkan upah atau imbalan, namun semata-mata agar tidak ada warga yang menjadi korban bencana alam. Semangat tolong menolong ditunjukkan ketika salah satu warga yang memiliki hajat, entah itu perkawinan atau pindah rumah, maka seluruh warga tanpa diperintah akan menyumbangkan tenaga dan material yang dimiliki guna menyukseskan hajat tersebut. Jiwa kemajemukan sangat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat, dimana ketika dihadapkan pada pekerjaan bersama, tak seorangpun warga yang memandang latar belakang suku, agama, ras atau golongan. Mereka meleburkan diri untuk kepentingan bersama dan memelihara keharmonisan umum. Sedangkan budi pekerti merupakan ajaran hidup yang diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia agar selalu menghormati dan menghargai orang lain, serta memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri (Kantor Komunikasi Publik, 2016).

Strategi Menghadapi Proxy War Dengan Mengembangkan Kekuatan Dengan Program Pembangunan Karakter

Pemuda adalah kelompok usia yang sangat dinamis dan labil dalam pencarian jati diri. Fungsi dan peranan wadah-wadah kepemudaan dengan visi dan misi yang sangat mulia pada aplikasi dilapangan ternyata sangat berbeda. KNPI, Pramuka atau Karang Taruna sudah tidak memadai untuk menggali kreativitas dan mobilitas pemuda. Visi dan misi yang tertulis terbatas hanya sebuah slogan tanpa pelaksanaan. (NATO: No Action Talk Only). Aktifitas organisasi sudah terlalu teoritis dan selalu dikendarai oleh suatu pihak untuk dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Pemuda harus diarahkan untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif. Wadah interaksi non formal perlu dibentuk agar pemuda bisa saling menopang dan saling menasehati karena pemuda masih labil serta mudah terpengaruh dan terhasut. Karena ketika ada kekosongan waktu, maka pemuda cenderung akan mencari kegiatan/kesibukan yang kurang produktif nongkrong-nongkrong, membuat geng sepadamotor, geng sekolah/kampus yang ujung-ujungnya akan berakhir dengan membuat kerusuhan.

Untuk itu, perlu dirintis pembentukan sebuah “program keterampilan madani” untuk mahasiswa baru yang berupa pelatihan singkat selama seminggu untuk pembentukan karakter dengan materi cinta tanah air dan bela negara dengan bekerja sama dengan Kostrad. Kegiatan ini merupakan kegiatan lapangan sekaligus pelatihan disiplin dan cinta lingkungan. Kegiatan lain yang perlu dikembangkan, yaitu kerjasama untuk berpartisipasi dalam program bedah rumah. Dalam program ini, mahasiswa diajak untuk bersama-sama bekerja membantu memperbaiki rumah tinggal dan tinggal di rumah yang sedang dibangun dengan maksud supaya mahasiswa ikut merasakan kehidupan yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat yang kekurangan, bukan *theoretical* saja tetapi *practical*. Berikutnya yaitu kembali menggelorakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke daerah pelosok dan pedalaman, membuat program mahasiswa masuk desa dan ikut dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikerjakan oleh TNI.

Semuanya ini untuk ikut membantu rakyat. Jadilah tokoh dan contoh di lingkungan dan tidak terpengaruh oleh budaya asing arus globalisasi yang mungkin bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Berpikirlah jernih, bijaksana namun kritis jika melihat hal-hal yang tidak sesuai norma kewajaran serta gunakanlah teknologi informasi seperti media sosial

untuk melakukan kroscek informasi yang berkembang dimasyarakat agar kita tidak mudah terpancing dan terprovokasi (Kementerian Pertahanan RI. 2015). Dengan adanya program pembangunan karakter diharapkan bahwa seluruh warga Indonesia dapat memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air yang baik. Sehingga, hal itu dapat mengubah Indonesia di mata dunia menjadi bangsa yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh bangsa lain dan menjadi bangsa yang besar.

KESIMPULAN

Proxy war adalah sebuah perang yang terjadi antara dua negara atau dua kubu dimana negara-negara tersebut tidak terlibat secara langsung, melainkan melibatkan pihak ke-tiga (peran pengganti). Perang justru terjadi di luar wilayah kedua negara yang saling bermusuhan. Besarnya ancaman Proxy War saat ini yang terjadi di berbagai kawasan dunia, tidak menutup kemungkinan ini pula yang terjadi di Indonesia. Perang Proxy yang merupakan sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa non state actors yang dapat berupa LSM, Ormas, kelompok masyarakat atau perorangan.

Singkatnya Proxy War merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah. Melalui perang Proxy ini tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan non state actors dari jauh. Negara musuh akan membiayai semua kebutuhan yang diperlukan oleh non state actors dengan imbalan. Indikasi Proxy War telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain, antara lain: Gerakan Separatis dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum merupakan contoh Proxy War yang nyata. Adapun beberapa ciri ciri Proxy War adalah: 1) Negara yang menjadi Proxy adalah negara sekutu sang pendukung, 2) Negara proxifier seringkali merupakan negara adidaya. Pentahapan perang Proxy sebagai berikut: Tahap I: Infiltrasi, tahap II: Eksploitasi, tahap III: Politik Adu Domba, dan tahap IV: Cuci Otak serta tahap V: invansi/pencapaian sasaran. Pengembangan Kekuatan dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Budaya dapat dilakukan dan Pembangunan karakter sangat dibutuhkan disini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2017. Menengok Kembali Peran Agama di Ruang Publik, dalam Jurnal Sosiologi Agama, Vol. XI, No. 2
- Bambang Trisutrisno, 2017. Merawat Sumpah Pemuda untuk Menghadapi Proxy War, Artikel.
- Daryono, Yan. 2017. Memahami Perang Generasi Ke-4.
[https://www.academia.edu/33378964/Memahami Perang Generasi Ke 4](https://www.academia.edu/33378964/Memahami_Perang_Generasi_Ke_4) Diakses tanggal 22 Juni 2022
- English Oxford Living Dictionaries, Proxy war, <https://en.oxforddictionaries.com/diakses> pada 29 Juni 2022
- Hidayat, Safril dan Wawan Gunawan. 2004. Proxy..., hal. 6-8. Lihat pula Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means To Success In World Politics*, (New York: Public Affairs. hal.111-112.
- Hidayat, Safril dan Wawan Gunawan, (2017). Proxy War dan Keamanan Nasional Indonesia: Victoria Concordia Crescit, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Vol. VII, No. 1

- Ibid. 2020. "Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua." <http://www.pskp.or.id/2020/09/17/separatisme-penyebab-munculnya-konflik-di-papua/> diakses 20 Juni 2022
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia*. Doktrin Pertahanan Negara tahun 2015 Permenhan RI No 38, Jakarta.
- Kementerian Pertahanan RI. 2020. *Bahan Pembelajaran Proxy War*. https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf
- Mumford, Andrew. 2013. *Proxy Warfare. War and Conflict in the Modern World*. Cambridge U.K: Polity Press
- Mumford, Andrew. 2013. *Proxy Warfare and The Future of Conflict*, The RUSI Journal, Volume 158, Number 2 hal. 40.
- Jawahir Thontowi. 2019. *Proxy War, Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Hukum International*. Semarang. Jawa Tengah.
- Kantor Komunikasi Publik. 2016. *Waspada, Proxy War Menyerang Berbagai Aspek Kehidupan di Indonesia*. <https://www.unpad.ac.id/2016/03/waspada-proxy-war-menyerang-berbagai-aspek-kehidupan-di-indonesia/>
- Nafis, M. Cholil. 2021. *Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Proxy War di Era Globalisasi*, Artikel, (t.t).
- Nye, Joseph S. 2009. *Understanding International Conflicts* 7th Edition, New York: Pearson. hal. 63.
- Stepanova, Ekaterina. 2011. *The Role of Information Communication Technologies in the Arab Spring* dalam Ponars Eurasia 15.
- Sudiaman, Maman. 2016. *Proxy War*. *Republika, Kolom Resonansi*, 13
- Wilson, E.J. 2008. *Hard Power, Soft Power, Smart Power*. *ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences*, Issue 616 hal. 114.
- Yan Daryono. 2017. *Memahami Perang Generasi Ke 4 Sebagai Perang Modern*. Naskah Sekolah Sesko TNI.